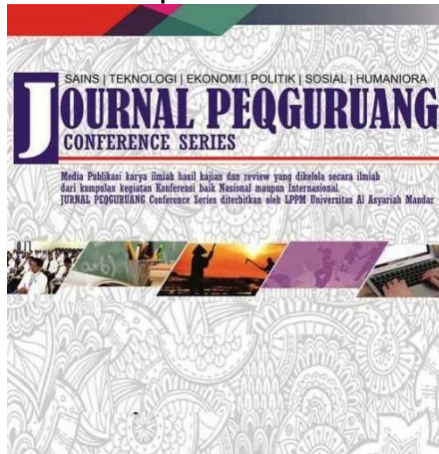


Graphical abstract



IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DI KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹Desi Bugis Mandasari Rachman, ¹Muhammad Syaeba, ¹Nur Fitrah
¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author
desimandasari88@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to know the role of knowing. This research aims to increase the knowledge and understanding of novice voters about the importance of participation in elections and encourage active participation and awareness of the younger generation in the democratic process. This research uses a type of qualitative descriptive research with an approach that focuses on understanding social phenomena and aims to describe the phenomena in detail using data collection techniques, namely interviews, observation and document analysis to provide in-depth descriptions. The results of the research show that the implementation of the political education program by the Polewali Mandar Regency KPU has gone well, although there are still several obstacles. This program includes outreach, training and discussion activities designed to increase novice voters' understanding of the political system, the electoral process and the importance of active participation in democracy. However, challenges such as limited resources, low interest among first-time voters, and lack of collaboration with educational institutions need to be overcome to increase program effectiveness. This research suggests that the Polewali Mandar Regency KPU expand the scope of political education programs by involving more stakeholders, including schools and youth organizations.

Keywords: *Political Education Program, Beginner Voters, Polewali Mandar Regency KPU*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu serta mendorong partisipasi aktif dan sadar dari generasi muda dalam proses demokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendetail dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen untuk memberikan deskripsi yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan politik oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Program ini mencakup kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang sistem politik, proses pemilu, dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya minat sebagian pemilih pemula, dan kurangnya kolaborasi dengan institusi pendidikan perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menyarankan agar KPU Kabupaten Polewali Mandar memperluas cakupan program pendidikan politik dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sekolah dan organisasi pemuda.

Kata kunci: *Program Pendidikan Politik, Pemilih Pemula, KPU Kabupaten Polewali Mandar*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.5425

Received : 2025-10-16 | Received in revised form : 2025-11-05 | Accepted : 2025-11-24

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat atau dengan kata lain, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama, rakyat berkuasa, pemerintahan dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Tetapi yang tidak dapat disangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen, ditandai dengan penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) dan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan corak khas demokrasi Indonesia. (Utami, 2020)

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahannya yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin. (Rachmawati, 2019)

Pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali mendapatkan hak pilihnya, umumnya terdiri dari remaja dan pemuda yang berusia antara 17 hingga 21 tahun. Kelompok ini merupakan bagian signifikan dari populasi pemilih dan memiliki potensi besar dalam menentukan hasil pemilu. Oleh karena itu, memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula menjadi penting untuk memastikan partisipasi mereka yang aktif dan berkualitas dalam proses demokrasi. (Nugroho, 2021)

Pendidikan politik tidak hanya ditujukan agar warga negara melek politik dengan mengetahui konsep-konsep dan teori politik sebab yang dituju oleh pendidikan politik bukanlah membentuk para ahli ilmu politik tetapi membina warga negara agar sadar dan peduli terhadap peristiwa politik yang terjadi baik dalam konteks masyarakat maupun negara, diwujudkan melalui partisipasinya dalam proses politik tersebut. (Saleh A, Fitrah N. 2023). Terkait dengan beberapa pihak yang memiliki kewajiban yuridis maupun moral dalam melakukan Pendidikan politik kepada warga negara, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengaturnya. Salah satunya dibebankan kepada partai politik. (Hidayat, 2018)

Untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis melalui pemilu, rakyat harus ikut berpartisipasi

didalamnya. Partisipasi politik merupakan fungsi yang dimiliki partai politik untuk mendorong masyarakat agar aktif dalam kegiatan politik yang biasanya dilakukan melalui indoktrinasi ideologi, asas partai kepada anggota, masyarakat yang ada dalam jangkauan partainya. Sedangkan mewujudkan partisipasi politik yang berkualitas diperlukan adanya pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan bentuk pendidikan orang dewasa yang diberikan kepada generasi muda, dengan jalan menyiapkan kader-kader politik untuk berkompetisi politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. (Mustika, 2017)

Banyak pemilih pemula yang masih kurang memahami mekanisme pemilihan umum, sistem politik, dan peran serta hak mereka sebagai pemilih. Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pemula dan potensi terjadinya kesalahan dalam memilih. Program pendidikan politik bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan ini dan memberikan informasi yang akurat serta relevan kepada pemilih pemula. (Hartini, 2019)

Secara umum, Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 tahun ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Segmentasi pemilih pemula seperti yang tergambar tersebut memang betul memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya. (Kusumawati, 2020)

Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran politik pemilih pemula yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajarkan di tengah ketidakpastian atas politik itu sendiri. Ketidakpastian di sini bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang terlibat kasus korupsi, ketimpangan atas hukum, dan masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut keberlangsungan pemilih pemula.

Banyak pemilih pemula yang masih kurang memahami mekanisme pemilihan umum, sistem politik, dan peran serta hak mereka sebagai pemilih. Kurangnya pengetahuan ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih pemula dan potensi terjadinya kesalahan dalam memilih.

Salah satu tujuan utama dari program pendidikan politik adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Dengan memahami pentingnya suara mereka, diharapkan pemilih pemula akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi secara keseluruhan.

Program pendidikan politik juga bertujuan untuk membentuk pemilih yang cerdas dan kritis. Dengan pengetahuan yang memadai tentang politik dan pemilu, pemilih pemula dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berdasarkan informasi saat memilih calon atau partai politik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik negatif seperti politik uang dan kampanye hitam.

Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan karena kurangnya kesadaran politik pemilih untuk menggunakan hak pilihnya yang disebabkan kurangnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 13 yang menyatakan :

“Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat”.

Politik sendiri tidak lepas dari partisipasi warga negara. Pelaksanaan partisipasi politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. Partisipasi politik pada dasarnya adalah kegiatan sekelompok orang untuk ikut dalam kegiatan politik.

Pelaksanaan Pendidikan Politik sangat erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu di atur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Salah satu tujuan utama dari program pendidikan politik adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Dengan memahami pentingnya suara mereka, diharapkan pemilih pemula akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi secara keseluruhan. (Data 2019 dan 2024 Kab. Polman) Program pendidikan politik juga bertujuan untuk membentuk pemilih yang cerdas dan kritis. Dengan pengetahuan yang memadai tentang politik dan pemilu, pemilih pemula dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan berdasarkan informasi saat memilih calon atau partai politik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik negatif seperti politik uang dan kampanye hitam.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yakni. Meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/PRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga- lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberika oleh UUD 1945.

Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh KPU merupakan sarana membentuk karakter kepemimpinan pada generasi muda. Bila melihat potensi generasi muda yang cukup besar tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan politik sangatlah penting untuk disampaikan sejak dini dan diketahui, dipahami

oleh rakyat Indonsia serta generasi muda agar rakyat tidak menjadi objek politik tetapi juga berperan sebagai subjek politik. Implementasi program pendidikan politik ini sering kali melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, organisasi kepemudaan, dan media massa. Kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program, sehingga dapat mencapai lebih banyak pemilih pemula.

Peraturan pemerintah No.83 tahun 2012 pasal 10 ayat 1 dan 2. Dan Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, dengan berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara serta untuk menjaga agar Pemilu dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan output pemilu yang memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan, maka alasan serta motivasi keterlibatan pemilih muda yang terkait dengan pendidikan politik sangat penting untuk diidentifikasi, dengan hal tersebut diharapkan dapat dihasilkan formulasi yang tepat untuk memaksimalkan peran pemilih muda pada pemilu- pemilu selanjutnya. Untuk dapat melakukan identifikasi peran pendidikan politik bagi pemilih muda sebagai upaya peningkatan partisipasi politik mereka, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penelitian.

Dengan dilaksanakannya pendidikan politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan generasi muda menjadi “melek politik” agar bersinergi dalam usaha pembangunan serta partisipatif, karena rakyat akan sadar akan hak dan kewajibannya, sadar hukum, kritis, aktif dan kreatif serta konstruktif. Berdasarkan atas permasalahan generasi muda dalam hal partisipasi politik, sangat penting bagi pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan politik perlu adanya kerjasama dengan dinas terkait atau swasta dalam mensukseskan pelaksanaan program pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda.

Meskipun masih terdapat kendala dalam proses kegiatan partisipasi pendidikan politik saat ini yakni kurangnya minat masyarakat atau generasi muda guna mengikuti kegiatan tersebut. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terus berusaha mendukung kegiatan pendidikan politik berjalan guna meningkatkan partisipasi generasi muda. Pendidikan politik bagi generasi muda juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Pemilih pemula sebagai suatu kelompok yang masih harus terus dibimbing dan diarahkan mengenai pemahaman masalah politik harus diedukasi secara berkala. Dengan demikian pemerintah berkewajiban mengadakan pembangunan politik sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem yang ideal dan ingin dikembangkan oleh suatu negara.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian ini ke lapangan (*Field Resear*) secara langsung di masyarakat melalui analisis data, wawancara, dokumentasi dan alat-alat lainnya serta merupakan data yang secara langsung dari lokasi penelitian. Data ini pun diperoleh sendiri secara mentah dari sekolah menengah pertama dan masih memerlukan analisa yang lebih lanjut dan lebih akurat lagi. Adapun sifat peneliti yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Mengacu pada pendapat Moleong Pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan suatu pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dengan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretensi. (Moleng, 2019)

Adapun pengertian kualitatif adalah penelitian tentang penyelidikan yang sifatnya dapat mendeskripsikan dan kebanyakan menggunakan analisis data, proses dan makna yang jadi tampilan serta landasan teori digunakan sebagai pedoman agar fokus penelitian dapat sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. (Sugiono, 2020)

Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci yang melukiskan keadaan yang ada, mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang diperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, dan melakukan evaluasi yang dapat menghasilkan suatu masukan untuk KPU Kabupaten Polewali Mandar (Arikunto, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program adalah proses yang kompleks dan terstruktur yang melibatkan berbagai tahapan untuk memastikan bahwa suatu program atau kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi program yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, program dapat mencapai tujuannya dan memberikan dampak positif bagi target.

1. Pengorganisasian Struktur

Pengorganisasian Struktur adalah proses merancang dan menyusun struktur organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam konteks program pendidikan politik, pengorganisasian struktur mencakup bagaimana berbagai elemen organisasi diatur, serta bagaimana tanggung jawab dan komunikasi dikelola untuk memastikan keberhasilan program. Pengorganisasian Struktur adalah proses menetapkan dan mengatur peran, tanggung jawab, dan hubungan di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Struktur ini mencakup pembagian tugas, penentuan wewenang, dan koordinasi antar bagian dalam organisasi.

Pengorganisasian Struktur adalah aspek krusial dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan politik. Memahami dan mengatur komponen seperti struktur hierarki, pembagian tugas, wewenang, dan saluran komunikasi akan membantu memastikan program dilaksanakan dengan efektif. Dengan desain struktur yang tepat, program dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif bagi pemilih pemula.

Dari berbagai pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pengorganisasian struktur dalam program pendidikan politik memainkan peran kunci dalam menentukan efektivitas dan efisiensi program. Meskipun struktur yang baik memiliki banyak kelebihan, seperti klaritas tugas, efisiensi, dan koordinasi, namun yang muncul sering berkisar pada fleksibilitas, partisipasi aktif, dan penyesuaian terhadap umpan balik. Ini bisa diatasi dengan pendekatan yang responsif dan adaptif akan meningkatkan kualitas dan dampak program pendidikan politik

2. Target Group

Target group atau kelompok sasaran adalah kelompok orang yang menjadi fokus utama dari suatu program, kampanye, atau kegiatan. Dalam konteks program pendidikan politik, memahami dan menetapkan target group adalah langkah krusial untuk merancang strategi yang efektif dalam mencapai tujuan program. Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang yang ditentukan sebagai audiens utama yang akan mendapatkan manfaat atau menjadi subjek dari program atau kegiatan. Dalam program pendidikan politik, target group adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat menerima informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang ditawarkan oleh program tersebut.

Dari berbagai pendapat yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa, Penetapan target group yang jelas membantu dalam merancang program yang lebih fokus dan efektif. Ini memungkinkan pengembangan materi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok sasaran. Jika target group adalah pemilih pemula, materi pelatihan dapat disesuaikan untuk mencakup pendidikan dasar tentang pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta cara memilih dengan benar. Namun, Program yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan target group dapat menghasilkan hasil yang lebih memuaskan dan berdampak positif.

Untuk pemilih pemula, program yang mencakup simulasi pemungutan suara dan diskusi tentang calon dan platform politik dapat membantu mereka merasa lebih siap untuk menghadapi pemilu. Penggunaan metode yang sesuai dengan karakteristik target group dapat meningkatkan partisipasi dan pemahaman. Untuk pemilih pemula, metode seperti workshop interaktif, video edukasi, dan diskusi kelompok dapat lebih efektif dibandingkan ceramah panjang. Jika target group tidak terdefinisi dengan baik, program bisa menjadi kurang fokus dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Dalam menetapkan target group perlu memperhatikan, jangsan yang terlalu umum seperti "semua pemilih"

tanpa mempertimbangkan usia, latar belakang, atau pengalaman politik mereka dapat membuat materi program tidak relevan untuk semua peserta. Jika target group kesulitan mengakses materi atau kegiatan program, maka program tersebut tidak akan mencapai tujuannya. Jika program tidak melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dari target group, maka program bisa jadi tidak efektif.

3. Unsur Pelaksana Implementasi

Implementasi program pendidikan politik yang sukses memerlukan pengukuran dan pemantauan melalui berbagai indikator yang mencakup unsur pelaksana utama. Komitmen dan dukungan dari pemerintah sangat penting untuk keberhasilan program pendidikan politik. Kebijakan yang jelas dan regulasi yang mendukung akan memberikan landasan hukum yang kuat. Alokasi anggaran yang cukup memastikan bahwa program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama antara berbagai instansi memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program. Indikator-unsur pelaksana implementasi program pendidikan politik mencakup berbagai aspek mulai dari dukungan pemerintah, keterlibatan lembaga pendidikan, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi, pelatihan, evaluasi, hingga penyediaan materi yang relevan. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, program pendidikan politik dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, mencapai tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik di seluruh lapisan masyarakat.

Dari berbagai pendapat yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa, unsur pelaksanaan implementasi program pendidikan politik memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan mengidentifikasi dan menanggapi secara proaktif, pelaksana program dapat memastikan bahwa pendidikan politik lebih inklusif, relevan, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Meningkatkan transparansi dalam proses evaluasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses ini..

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai "Implementasi Program Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula di KPU Kabupaten Polewali Mandar", dapat disimpulkan bahwa: Program pendidikan politik yang diadakan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk pemilih pemula terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman politik dan kesadaran pemilih di kalangan pemilih pemula. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa lebih paham mengenai proses pemilu, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu. Peserta program mengalami peningkatan pemahaman tentang tahapan pemilu, fungsi pemilihan umum, dan peran mereka sebagai pemilih.

Dari ke 3 indikator menurut Abdullah Putra (2014:54) yang pertama Pengorganisasian Struktur pada pelaksanaan Program Pendidikan Politik sudah jelas pengorganisasiannya, kemudian indikator 2 target group itu

juga sudah sesuai karena yang menjadi sasaran dalam program ini yakni pemilih pemula yang berusia antara 17 hingga 21 tahun, mereka adalah generasi muda yang baru memasuki usia dewasa secara hukum ini adalah pengalaman pertama mereka dalam berpartisipasi dalam pemilu. dan Indikator Terakhir Unsur Pelaksana Implementasi itupun sudah sesuai dengan indikator menurut Abdullah Putra (2014:54) karena unsur pelaksana implementasinya masing-masing sudah berusaha menjalankan dan bertanggung jawab dengan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Semarang: Alfabeta.

Hartini, S. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3).

Hidayat, D. (2018). Pengaruh Program Pendidikan Politik Terhadap Pengetahuan Politik Pemilih Pemula. *Jurnal Sosial dan Politik*, 15(3).

Kusumawati, W. (2020). Kepedulian Pemilih Pemula Terhadap Politik: Dampak Program Pendidikan Politik. *Jurnal Kebijakan Publik dan Politik*, 13(2).

Moleng, L. J. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia.

Mustika, W. (2017). Efektivitas Pendidikan Politik di Kalangan Remaja Pemilih Pemula. *Jurnal Politik Indonesia*, 6(2).

Nugroho, R. (2021). Evaluasi Program Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan*, 12(1).

Rachmawati, D. (2019). Implementasi Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 6(1).

Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Utami, N. (2020). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(2).

Saleh, A., Fitrah, N., & Febriani, W. (2024, January). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Studi Kasus Kecamatan Campalagian). In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 5, No. 2, pp. 417-422).